

**“ KONSTITUSIONALITAS TRIUMVIRAT DALAM HUKUM
TATA NEGARA DARURAT INDONESIA PERSPEKTIF
SIYASAH TANFIDZIYAH“**



**PARI PROLINA
NIM 2011150074**

**“ KONSTITUSIONALITAS TRIUMVIRAT DALAM HUKUM
TATA NEGARA DARURAT INDONESIA PERSPEKTIF
SIYASAH TANFIDZIYAH”**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)

Oleh :

PARI PROLINA

2011150074

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU
TAHUN 2024 M/ 1445 H**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
FAKULTAS SYARIAH

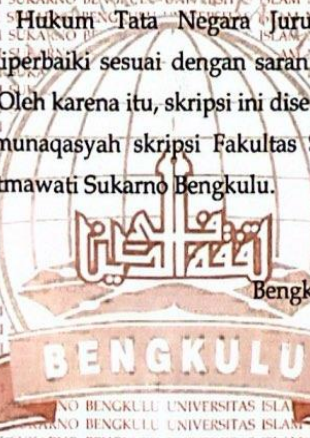
Jl. Raden Patah Pagar Dewa, Telp. (0736) 51276 51771 Fax. (0736) 51771 Bengkulu

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh **PARI PROLINA**, NIM. 2011150074

dengan judul: **"Konstitusionalitas triumvirat dalam hukum tata negara darurat indonesia perspektif siyasah tanfidziyah"**

Program Studi Hukum Tata Negara Jurusan Syariah telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.



Bengkulu, Juni 2024 M

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. Imam Mundi, SH., MH

Ifansyah Putra, M. Sos

NIP. 196503071998031005

NIP. 198203182010011012



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
FAKULTAS SYARIAH
 Jl. Raden Fatah Pagar Dewa, Telp. (0736) 51276 51771, Fax. (0736) 51771 Bengkulu

PENGESAHAN

Skripsi disusun **Pari Prolina**, NIM 2011150054 dengan judul
**"Konstitusionalitas Triumvirat Dalam Hukum Tata Negara
 Darurat Indonesia Perspektif Siyasa Tanfidziyah"**
 Program Studi **Hukum Tata Negara Fakultas Syariah**, telah
 diuji dan dipertahankan di depan **Tim Sidang Munaqasyah
 Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno**
 Bengkulu pada:

Hari : **Kamis**
 Tanggal : **13 Juni 2024**

Dan dinyatakan **LULUS**, dapat diterima dan disahkan
 sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana hukum (S. H.)
 dalam Ilmu Hukum Tata Negara.



Bengkulu, **2024 M**
1445 H

Dekan,

Prof. Dr. Suwarjin, S. Ag., M.A
 NIP. 196904021999031004

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua Sekertaris
Prof. Dr. Imam Mahdi, SH, MH **Ifansyah Putra, M. Sos**
 NIP. 196503071998731005 NIP. 199303312019031005

Penguji I Penguji II
Ismail Jalili, M. Ag., Ph. D. **Risfiana Mayangsari, MH**
 NIP. 197508272000031001 NIP. 199305112020122012

MOTO

*“HIDUP YANG NORMAL ADALAH KEHIDUPAN YANG TIDAK
NORMAL, BERPIKIR DILUAR KENDALI TRADISI DAN BUDAYA,
BERGERAK BEBAS TANPA MENGHARDIK KEMANUSIAAN,
BERPERILAKU JUJUR DAN IKHLAS”*

“PARI PROLINA”



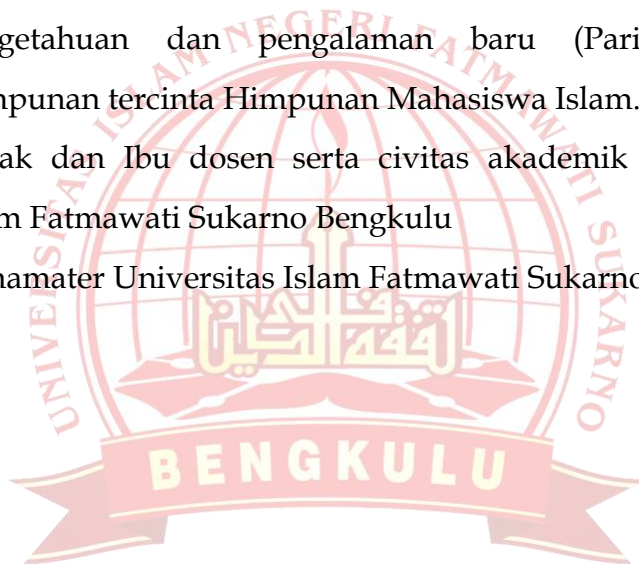
PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan Alhamdulillah atas limpahan rahmat, taufik serta Hidayah nya, perjalanan yang panjang dan penuh halangan serta rintangan tetapi penulis tetap penuh kesabaran dan keikhlasan sehingga bisa menyelesaikan penyusunan skripsi dengan baik, karya ini penulis persembahkan kepada orang-orang yang penulis cintai dan banggakan, yaitu :

1. Untuk kedua orang tuaku (Bapak Abi Kusno dan Ibu Susilawati) yang tersayang doa dan restumu selalu mengiringi setiap langkahku yang tidak akan punda hingga akhir hidupku, terima kasih atas emosional biologis yang senantiasa menyelinap di ruang-ruang hampa sebagai penyalur semangat.
2. Untuk Adikku (Jimi Padli dan Regina Putri) terima kasih telah menjadi penguat dikalah gundah, ada banyak harapan tercurah yang menyertai disetiap perjalanan spiritual hingga selesainya skripsi ini.
3. Terima kasih kepada Bapak Prof. Dr. Imam Mahdi, SH, MH sebagai Pembimbing I, yang telah memberikan arahan dan nasehat yang diberikan disela-sela kesibukan waktunya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini semoga kemudahan dan keberkahan selalu menyertai beliau dan keluarga.
4. Terima kasih kepada Bapak Ifansyah Putra, M. Sos pembimbing II, yang penuh dengan kesabaran bersedia

mengoreksi secara teliti tulisan ini, sehingga lebih layak dan berarti, semoga kemudahan dan keberkahan selalu menyertai beliau dan keluarga.

5. Terima kasih keluarga kecil yang penuh dengan kehangatan, rumah kecil yang tak terdefinisi indahnya, ruang intelektual pengikis kehidupan yang eksklusif dan menyeramkan, terima kasih riang sambut senyum ketulusan kepada perempuan kecil dengan semangat membara pemburu ilmu pengetahuan dan pengalaman baru (Pari Proliana) Himpunan tercinta Himpunan Mahasiswa Islam.
6. Bapak dan Ibu dosen serta civitas akademik Universitas Islam Fatmawati Sukarno Bengkulu
7. Almamater Universitas Islam Fatmawati Sukarno Bengkulu



HALAMAN PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi dengan judul **"konstitusionalitas Triumvirat dalam hukum tata negara darurat Indonesia perspektif siyasah Tanfidziyah"**
2. Adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu maupun di perguruan tinggi lainnya.
3. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran, dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
4. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipa secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskahnya, dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Juni 2024

menyatakan,



NIM. 2011150074

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah swt. karna atas limpah rahmat dan bimbingan-nya penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah berupa skripsi yang berjudul **Konstitusionalitas Triumvirat Dalam Hukum Tata Negara Darurat Indonesia Perspektif Siyash Tanfidziyah**

Selanjutnya sholawat beiring salam penulis do'akan kepada Allah SWT semoga selalu tersampaikan kepada nabi muhammad SAW. Atas petunjuk dari risalah-nya serta dorongan dari berbagai pihak yang membantu penulis memberikan Referensi dalam Penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak lepas dari adanya bimbingan, motivasi, dan bantuan dari berbagai pihak untuk itu penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. H. Zulkarnain Dali, M.Pd, selaku rektor Universitas Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah memberikan berbagai fasilitas dalam membina ilmu pengetahuan di univeraitas Fatmawati Sukarno Bengkulu.
2. Dr. Suwarjin, M.A, selaku dekan fakultas syariah Universitas Fatmawati Sukarno Bengkulu.
3. Ifansyah Putra, M.sos, Ketua Prodi Hukum Tata Negara (HTN) Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu sekaligus sebagai pembimbing II yang telah banyak membantu memberikan sumbangsih pikiran dan motivasi

dalam menyelesaikan skripsi ini.

4. Bapak Prof. Dr. Imam Mahdi, SH, MH dan selaku pembimbing I yang telah banyak membantu memberikan sumbangan pikiran dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah Universitas Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah mengajar dan memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
6. Pejabat dan staf administrasi Fakultas Syariah Universitas Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
7. Semua pihak yang telah berkontribusi nyata dalam penulisan Skripsi ini.

Penulis juga menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, penulis sangat membutuhkan kritikan dan saran dari pembaca untuk membangun skripsi ini agar menjadi lebih baik lagi.

Demikian yang dapat penulis sampaikan semoga melalui skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Bengkulu, Juni
2024
Penulis

PARI PROLINA
NIM: 2011150074

ABSTRAK

Konstitusionalitas Triumvirat Dalam Hukum Tata Negara Darurat Indonesia Perspektif Siyasah Tanfidziyah Oleh Pari Prolina NIM 2011150074, pembimbing 1 : Prof. Dr. Imam Mahdi, SH, MH dan pembimbing II, Ifansyah Putra, M. Sos

Latar belakang penelitian ini adalah sebuah negara perlu adanya pemimpin, jika terjadi kekosongan maka sebuah negara harus memiliki sistem untuk mengantisipasinya. Oleh karena itu, penelitian ini menganalisis mengenai konstitusionalitas menteri triumvirat dalam hukum tata Negara darurat serta melihat peranya sebagai pengisi kekuasaan sementara dan perlu ditinjau di dalam siyasah syar'iyah secara kedudukan dan sistem pengisian kevakuman sebuah negara. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan menteri triumvirat dalam mengisi kekosongan jabatan presiden di Indonesia dan tinjauannya dalam perpektif siyasah tanfidziyah. Adapun jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan pendekatan penelitian adalah perundangan-undangan, sejarah, dan perbandingan. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah penelitian kepustakaan. Kemudian bahan hukum normatif diolah dengan metode analisis normatif yakni menginterpretasikan dan mendiskusikan berdasarkan pengertian hukum, norma hukum, teori-teori hukum, serta doktrin yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Hasil dalam penelitian ini adalah konstitusionalitas dari Menteri Triumvirat berdasarkan pasal 8 ayat 3 Undang-undang Dasar 1945 dan pasal 4 ayat (2) huruf a Undang-Undang No. 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara ialah sebagai pengganti kepala negara dan wakil kepala negara apabila berhalangan tetap, dan menjalankan tugasnya masing-masing secara bersama-sama, dalam ketatanegaraan darurat diperlukan peraturan yang lebih spesifik yang membahas persoalan menteri triumvirat. Di bidang siyasah syar'iyah menurut pandangan Imam Al Mawardi apabila terjadi kekosongan kekuasaan maka kewajiban dipegang oleh pemilih melalui dua cara yakni: 1. Ditunjuk langsung oleh orang yang memiliki wewenang untuk memilih pemimpin. 2, Melalui lembaga Ahlul Halli Wal Al 'Aqdi. Namun, apabila belum ada pemimpin baru

yang disahkan, maka lembaga Syuro akan mengangkat khalifah sementara untuk mengisi kevakuman kekuasaan jabatan Presiden sampai khalifah baru disahkan. Oleh karena itu, dalam Islam sangat menekankan harus adanya pemimpin walaupun itu seorang pemimpin yang zalim, karena kekosongan kekuasaan sangat banyak mudharatnya ketimbang dipimpin oleh pemimpin yang zalim. Sehingga kedudukan menteri triumvirat di dalam Siyash Syar'iyah adalah mencegah terjadinya kemudharatan yang disebabkan kevakuman di dalam sebuah negara.

Kata kunci : menteri triumvirat, undang-undang, siyash tanfidziyah



ABSTRACT

The Constitutionality of the Triumvirate in Indonesian Emergency Constitutional Law: A Siyasaḥ Tanfidziyah Perspective, By Pari Prolina, NIM 2011150074 , Supervisor I: Prof. Dr. Imam Mahdi, SH, MH , Supervisor II: Ifansyah Putra, M. Sos

The background of this research is that a country needs leadership, and in the event of a vacancy, there must be a system in place to anticipate it. Therefore, this research analyzes the constitutionality of the triumvirate ministers in emergency state constitutional law and examines their role as interim power holders from the perspective of siyasaḥ syar'iyah in terms of their status and the system for filling a power vacuum in a country. The objective of this research is to understand the position of the triumvirate ministers in filling the presidential vacancy in Indonesia and to review it from the perspective of siyasaḥ tanfidziyah. The type of research used is normative legal research, with the research approach being legislative, historical, and comparative. The technique for collecting legal materials used is library research. Then, the normative legal materials are processed using normative analysis methods, which involve interpreting and discussing based on legal concepts, legal norms, legal theories, and doctrines related to the core issue. The findings of this research are that the constitutionality of the Triumvirate Ministers, based on Article 8 paragraph 3 of the 1945 Constitution and Article 4 paragraph (2) letter a of Law No. 39 of 2008 concerning State Ministries, is to replace the head of state and the deputy head of state if they are permanently unable to fulfill their duties, and to perform their respective duties together. In emergency state constitutional law, more specific regulations are needed to address the issues of the triumvirate ministers. In the field of siyasaḥ syar'iyah, according to Imam Al Mawardi, if there is a power vacuum, it is the obligation of the electorate to fill it through two methods: 1. Direct appointment by someone with the authority to choose a leader. 2. Through the Ahlul Halli Wal Al 'Aqdi institution. However, if a new leader has not yet been confirmed, the Syuro institution will appoint an interim caliph to fill the presidential power vacuum until a new caliph is confirmed. Therefore, in Islam, it is emphasized that there must be a leader, even if he is a tyrant, because a power vacuum is much more harmful than being led by a tyrant. Thus, the position of the triumvirate ministers in Siyasaḥ Syar'iyah is to prevent the harm caused by a power vacuum in a country.

****Keywords:**** *triumvirate ministers, law, siyasah tanfidziyah*



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
SURAT PERNYATAAN.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRAC	xi
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	13
E. Penelitian Terdahulu.....	13
F. Metode Penelitian.....	20
G. Sistematika Penulisan	24
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Teori Negara Hukum	25
B. Teori hukum tata Negara darurat	33
C. Teori menteri triumvirat	41
D. Teori siyasah tanfidziyah	46

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konstitusionalitas Triumvirat Sebagai Pengganti Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Hukum Tata Negara Darurat Indonesia	55
1. Keberadaan Konsep Triumvirat Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia.....	55
2. Konstitusionalitas Dalam Konteks Hukum Tata Negara Darurat Indonesia	70
B. Kedudukan Triumvirat Sebagai Pengganti presiden Dan Wakil Presiden Perspektif siyasah Tanfidziyah	86
1. Konsep Imamah Dalam sistem Ketatanegaraan Islam	87
2. Pengisian Kekosongan Jabatan Imamah	88
3. Konsep Wizarah Dalam Sistem Ketatanegaraan Islam	92

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	101
B. Saran	102

DAFTAR PUSTAKA

LAMPRAN